

## Abstrak

Saat hubungan konsuler terjalin antar negara, maka timbul kewajiban bagi pihak negara penerima maupun negara pengirim berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Negara penerima memiliki kewajiban untuk melindungi premis gedung konsuler dikarenakan hak tidak bisa diganggu gugatnya premis tersebut (*inviolability*), begitupula dengan negara pengirim memiliki kewajiban untuk menghormati hukum nasional yang berlaku di dalam negara penerima untuk dapat menikmati hak kekebalan konsulernya. Peristiwa penganiayaan demonstran di Konsulat Jenderal China di Manchester, United Kingdom ini menandakan adanya suatu pelanggaran yang terjadi di wilayah konsulat tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah apa indikasi pelanggaran hak kekebalan konsuler yang dilakukan oleh pihak China sebagai negara pengirim dan Inggris sebagai negara penerima dalam aksi kekerasan kepada demonstran di wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester serta bagaimana tanggung jawab Inggris sebagai negara penerima dan China sebagai negara pengirim terhadap insiden aksi penganiayaan kepada demonstran di wilayah Konsulat Jenderal China di Manchester serta penyelesaian dari insiden tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode analisis kualitatif. Indikasi pelanggaran hak kekebalan konsuler yang dilakukan oleh Pejabat Konsuler China sebagai representasi negara pengirim adalah tidak menghormati hukum nasional negara penerima yaitu Inggris, sedangkan Inggris sebagai negara penerima tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi *inviolability* dari premis gedung konsuler. Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila hubungan di antara kedua negara semakin keruh, maka mediator di dalam hal ini dibutuhkan sebagai pihak ketiga yang dapat berupa Dewan Keamanan PBB maupun Sekretaris Jenderal PBB. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Inggris dapat berupa *satisfaction* sedangkan China dapat berupa kompensasi maupun *satisfaction* berdasarkan *Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001*.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Negara; Pelanggaran; Hak Kekebalan

Konsuler;

## ***Abstract***

*When consular relations are established between countries, obligations arise for both the receiving and sending countries based on the 1963 Vienna Convention on Consular Relations. The receiving state has an obligation to protect the premise of consular building due to the inviolability of the premise, as well as the sending state has an obligation to respect the national laws that apply in the receiving state to be able to enjoy the right of consular immunity. The incident of persecution of demonstrators at the Chinese Consulate General in Manchester, United Kingdom indicates a violation that occurred in the consulate area. The problem of this research is what are the indications of violations of consular immunity rights committed by China as a sending country and the United Kingdom as a receiving country in acts of violence against demonstrators in the territory of the Chinese Consulate General in Manchester and how the responsibility of the United Kingdom as a receiving country and China as a sending country for the incident of persecution of demonstrators in the territory of the Chinese Consulate General in Manchester and the resolution of the incident. This research uses a normative juridical approach method. The research specification is descriptive analytical with qualitative analysis method. Indications of violations of consular immunity rights committed by Chinese Consular Officers as representatives of the sending country are that they do not respect the national law of the receiving country, namely the UK, while the UK as the receiving country does not carry out its obligations to protect the inviolability of the premise of the consular building. The settlement that can be done if the relationship between the two countries is getting tense, then the mediator in this case is needed as a third party which can be the UN Security Council or the UN Secretary General. The responsibility that can be given by the UK can be in the form of satisfaction while China can be in the form of compensation or satisfaction based on the Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001.*

***Keywords:*** *State Responsibility; Violation; Right of Consular Immunity;*